



# BUPATI PATI

## PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 31 TAHUN 2005

### TENTANG

### KEBIJAKAN STRATEGIS PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (JAKSTRA LITBANGRAP IPTEK)

KABUPATEN PATI 2006-2011

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terarah, terpadu dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai kebijakan strategis penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Jakstra Litbangrap Iptek) Kabupaten Pati 2006-2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
  8. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 131);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 67 Seri D);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati, (Berita Daerah Kabupaten Pati tahun 2005 Nomor 32).
13. Keputusan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PATI TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (JAKSTRA LITBANGRAP IPTEK) KABUPATEN PATI 2006-2011**

**Pasal 1**

Kebijakan Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Pati Tahun 2006-2011 selanjutnya disingkat Jakstra Litbangrap Iptek adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Sistematika Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati Tahun 2006-2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS
  - BAB III : PRINSIP DASAR, VISI, MISI & TUJUAN STRATEGIS
  - BAB IV : KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK (UMUM)
  - BAB V : KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK DALAM BIDANG PEMBANGUNAN
  - BAB VI : PRIORITAS UTAMA LITBANGRAP IPTEK
  - BAB VII : PENUTUP
- MATRIK LITBANGRAP IPTEK

## Pasal 3

Kebijakan Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pati dimaksudkan agar semua kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berpedoman pada Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati dapat dilaksanakan secara lebih sinergis, lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai bagian terpadu pembangunan di Kabupaten Pati.

## Pasal 4

Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam menumbuhkembangkan motivasi, stimulasi, dan arah kebijakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Jakstra Litbangrap Iptek tahun 2006-2011 dikoordinasikan Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Jakstra Litbangrap Iptek tahun 2006-2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA <sup>710</sup> <sub>620206</sub>	
ASISTEN EKIBANG	
Ymt. KABAG HUMAS	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	LITBANG

WE: 941  
9.2.06

135

Ditetapkan di Pati

pada tanggal : 15 Desember 2005

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal: 15 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO



**BUPATI PATI**

**PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR : 31 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN STRATEGIS  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
KABUPATEN PATI 2006 - 2011**

**(JAKSTRA LITBANGRAP IPTEK KAB. PATI)**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

2005

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Posisi, Maksud, Tujuan dan Hasil yang diharapkan.....	2
C. Landasan.....	3
D. Pendekatan.....	5
<b>BAB II. KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS.....</b>	<b>6</b>
A. Modal Dasar.....	6
B. Permasalahan Dasar.....	8
C. Lingkungan Strategis.....	8
D. Tantangan Pembangunan.....	11
<b>BAB III. PRINSIP DASAR, VISI, MISI &amp; TUJUAN STRATEGIS.....</b>	<b>13</b>
A. Prinsip Dasar.....	13
B. Visi.....	13
C. Misi.....	14
D. Tujuan Strategis.....	14
<b>BAB IV. KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK (UMUM).....</b>	<b>16</b>
A. Landasan dan Kerangka Kerja.....	16
B. Kebijakan Umum Litbangrap Iptek.....	16
C. Indikator Kinerja.....	17
D. Wahana Pencapaian.....	18
<b>BAB V. KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK DALAM     BIDANG PEMBANGUNAN.....</b>	<b>20</b>
A. Ekonomi.....	20
1. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.....	20

2. Perindustrian dan Perdagangan.....	22
3. Perkoperasian, UKM dan Penanaman Modal.....	23
B. Sosial Budaya dan Pemerintahan.....	25
1. Hukum, HAM dan Kamtibmas.....	25
2. Politik.....	26
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	27
4. Pendidikan, Kebudayaan, Generasi Muda dan Olahraga.....	28
5. Kesehatan.....	31
6. Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.....	32
7. Agama.....	34
8. Aparatur Pemerintah.....	35
9. Pemberdayaan Masyarakat.....	36
10. Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	37
11. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	38
C. Fisik.....	40
1. Sumber Daya Air dan Irigasi .....	40
2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan.....	41
3. Sumber Daya Kelautan.....	43
<b>BAB IV. PRIORITAS UTAMA LITBANGRAP IPTEK.....</b>	<b>45</b>
A. Pertanian.....	46
B. Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah (UKM/IKM).....	47
<b>BAB VII. PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
<b>MATRIK LITBANGRAP IPTEK.....</b>	<b>50</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan unsur peradaban manusia yang sangat penting untuk mendayagunakan dan memanfaatkan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa guna menunjang pencapaian kesejahteraan dan kualitas hidup manusia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang lebih luas bagi penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu perencanaan strategis.

Pembangunan bidang Iptek mendapat legalitas yang lebih nyata dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang. Hal ini secara jelas memberikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam berbagai kegiatan terkait Iptek.

Disamping itu pembangunan bidang Iptek sendiri, sekaligus memiliki dua dimensi. Pembangunan di bidang Iptek disatu sisi secara sadar dijadikan sarana bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan yang spesifik

lokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati dan sekaligus mempunyai daya saing yang tangguh secara global. Disisi lain, pembangunan dibidang Iptek harus dijadikan sasaran pembangunan di daerah Kabupaten Pati.

Secara nasional, pembangunan bidang Iptek disepakati sebagai politik negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera sesuai dengan amanat UUD 1945. Jabarannya ditingkat daerah khususnya di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, pembangunan bidang Iptek ditetapkan melalui Kabuptusan Bupati Pati, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pati yang adil dan sejahtera.

## **B. Posisi, Maksud, Tujuan dan Hasil yang Diharapkan**

### **1. Posisi**

Kabijakan Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di Kabupaten Pati tahun 2006-2011 selanjutnya disingkat **Jakstra Litbangrap Iptek** Kabupaten Pati adalah penjabaran dari:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama paal 20 ayat 2, bahwa Pemerintah Daerah Wajib meumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strstegis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi didaerahnya.
- b. Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2005-2009;
- c. Secara sinergis melengkapi dan mewujudkan Jakstra Litbangrap Iptek Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

## **2. Maksud**

Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati dimaksudkan agar semua kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek berpedoman pada Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati dapat dilaksanakan secara lebih sinergis, lebih berdaya guna dan lebih berhasil guna sebagai bagian terpadu pembangunan di Kabupaten Pati.

## **3. Tujuan**

Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pati (Dinas, Badan, Kantor), Unit Litbangrap Iptek milik Pemerintah dan swasta, Perguruan Tinggi, badan usaha, serta masyarakat pada umumnya dalam menyusun kebijakan prioritas serta pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Litbangrap Iptek di seluruh Kabupaten Pati.

## **4. Hasil yang Diharapkan**

Disusunnya Jakstra Litbangrap Iptek ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan melaksanakan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati bagi semua Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Lembaga-lembaga Litbangrap Iptek, Dewan Rised Daerah (DRD), Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat pada umumnya yang berperan serta melaksanakan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati.

## **C. Landasan**

Secara konstitusional, Litbangrap Iptek memiliki dasar pijakan yang sangat kokoh, dengan dicantumkannya Iptek dalam Pasal 31 Ayat 5 dalam Amandemen IV UUD 19945. Secara eksplisit mewajibkan pemerintah memajukan Iptek untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah antara lain telah mengatur kewenangan daerah lingkup Propinsi, Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya adalah

kewenangan dibidang penelitian, pengembangan (Litbang) dan Iptek. Bila hal ini dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20. Pasal 18 menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Ayat 1); (2) Pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah dibidang Iptek (Ayat 2). Selanjutnya Pasal 20, menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi dalam menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim kondusif tersebut (Ayat 1); (2) Instrumen tersebut berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggarakan program Iptek dan pembentukan Lembaga Iptek (Ayat 2) dan (3) Lembaga yang dimaksud diatas adalah dapat meliputi Lembaga Litbang dan Lembaga Penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Non Departemen maupun Unit Kerja Departemen atau Pemerintah Daerah tertentu (Ayat 3).

Dengan memberikan kewenangan yang ada pada daerah, baik berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, maka Lembaga Iptek mutlak dibutuhkan baik di pusat maupun di daerah.

Pada tingkat operasional UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah dibidang kebijakan Iptek kecuali teknologi

tinggi yang strategis. Saling melengkapi dengan Undang-undang tersebut di tahun yang sama dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kewenangan kedua Undang-undang tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjabarkan tersebut termasuk kewenangan bidang Litbangrap Iptek di daerah.

Pada tingkat yang lebih operasional di seluruh Indonesia, diberlakukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Didalam Undang-undang tersebut secara jelas menguraikan berbagai aspek terkait Litbangrap Iptek antara lain mengenai: (1) azas, tujuan dan fungsi; (2) peran dari unsur-unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek; (3) fungsi dan peran pemerintah pusat dan daerah; dan (4) peran serta masyarakat. Khususnya peran pemerintah daerah, disebutkan dalam Undang-undang tersebut bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk (a) mengembangkan instrumen kebijakan; (b) menganggarkan dana di APBD; (c) mensponsori HKI; (d) memberikan penghargaan bagi investor; (e) membangun sarana prasarana; (f) mendorong alih teknologi; dan (g) membentuk Dewan Riset Daerah.

#### **D. Pendekatan Penyusunan**

Penyusunan Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati Tahun 2006-2011, menggunakan pendekatan Multidimensi Fokus Kebijakan, sesuai dengan saran Majchrzak (1984) bahwa kebijakan publik secara tipikal dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah social yang kompleks dan munculnya disebabkan oleh banyak dimensi, factor, efek dan peristiwa. Selanjutnya dikatakan bahwa karakteristik penelitian dalam hal ini penyusunan kebijakan bersifat multidimensional atau banyak dimensi, bersifat empiris-deduktif dan menggabungkan dimensi masa depan dan masa kini serta menonjolkan dimensi kerjasama secara eksplisit.

## BAB II

### KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS

#### A. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan Kabupaten Pati meliputi:

1. Secara geografis Kabupaten Pati termasuk strategis, dipandang dari letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Republik Indonesia dan berada pada  $110^{\circ},50'$ - $111^{\circ},15'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ},25'$ - $70^{\circ},00'$  Lintang Selatan. Kabupaten Pati mempunyai wilayah laut, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, sungai, waduk dan perairan umum serta iklim yang menguntungkan. Kondisi tersebut memberi keuntungan yang memungkinkan tumbuhnya berbagai sumberdaya hayati baik tumbuh-tumbuhan maupun hewani;
2. Secara demografi Kabupaten Pati mempunyai jumlah penduduk cukup besar yaitu 1.218.267 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 600.700 jiwa dan perempuan 617.567 jiwa. Selama tahun 2003-2004 pertambahan penduduk sebanyak 9.553 jiwa (BPS Pati, 2004), merupakan potensi efektif apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas produksi di berbagai bidang dan mampu bersaing dengan daerah lain;
3. Sumber daya alam Kabupaten Pati yang terdiri dari luas wilayah 150.368 Ha, meliputi lahan sawah 58.739 Ha, lahan bukan sawah 91.629 Ha. Jenis tanah bagian utara terdiri dari tanah *Red Yellow*, *Latosol*, *Aluvial*, *Hidromer* dan *Regosol*, sedangkan bagian selatan terdiri dari *Aluvial*, *Hidromer*, dan *Gromosol*. Iklim yang ada diwilayah Kabupaten Pati yaitu curah hujan rata-rata pada tahun 2004 sebanyak 1.603 mm dengan 88 hari hujan, untuk temperatur terendah  $24^{\circ}$  C dan tertinggi  $39^{\circ}$  C. Adapun ketinggian wilayah Kabupaten Pati, terendah 1 meter dari permukaan laut dan tertinggi 380 meter diatas

permukaan laut dengan rata-rata ketinggian tempat kurang lebih 17 meter diatas permukaan laut.

4. Kelembagaan pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Pati untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), bertekad untuk mandiri sebagaimana ditegaskan dalam visi dan misi Kabupaten Pati. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pati; “Menjadikan Kabupaten Pati pada tahun 2010 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Tengah yang didukung oleh sektor Pertanian, Agroindustri dan Industri Kecil Menengah serta Pelabuhan Umum Juwana dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang kuat ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, pelayanan umum dan pemberdayaan potensi ekonomi secara optimal menuju masyarakat yang MINATANI“. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pati tersebut, maka yang menjadi misi Kabupaten Pati adalah: (1) Membina dan mengembangkan kemampuan organisasi/lembaga aparatur dan masyarakat; (2) Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; (3) Menumbuhkan kemandirian daerah melalui kemitraan antar pemerintah dengan masyarakat, termasuk dunia usaha dan meningkatkan sumber keuangan secara kreatif serta optimalisasi sektor pertanian, agrobisnis, agroindustri, industri kecil, menengah dan jasa Pelabuhan Juwana; (4) Menumbuhkan kondisi Kabupaten Pati yang kondusif, terciptanya supremasi hukum serta terwujudnya keputusan politik/produk perundang-undangan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; (5) Membangun masyarakat Pati yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, berdemokratisasi dan turut menciptakan perdamaian, berdasarkan kebenaran yang hakiki.
5. Kondisi politik yang makin demokratis, mendorong meningkatnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam menetapkan kebijakan daerah.

## **B. Permasalahan Dasar**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), khususnya dalam Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Litbangrap Iptek), antara lain:

1. Masih lemahnya kelembagaan, fungsi dan peran Lembaga Litbangrap Iptek dalam mengembangkan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Iptek;
2. Belum kuatnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Iptek;
3. Belum kuatnya kinerja jaringan Litbangrap Iptek, sehingga hasil-hasil penelitian belum dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin baik oleh pengambil kebijakan, *stakeholders* maupun masyarakat dan dunia usaha;
4. Belum fokusnya sasaran Litbangrap Iptek untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah;
5. Belum kuatnya posisi daya saing dan kemandirian dalam kehidupan global.

## **C. Lingkungan Strategis**

### **1. Bidang Ekonomi**

Struktur ekonomi Kabupaten Pati tergambar dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati secara agregat tahun 2004 atas dasar harga berlaku sebesar 9,22 % dan atas dasar harga konstan 4,37 %. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari sumbangan pertumbuhan dari sektor ekonomi yang ada. Dari kesembilan sektor ekonomi pada tahun 2004, ada empat sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan Kabupaten (4,37 %) diantaranya: sektor listrik, gas dan air minum tumbuh sebesar 14,43 %, disusul sektor industri pengolahan sebesar 6,39 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan



sebesar 4,61 %, dan sektor pertanian sebesar 4,48 %. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan dibawah pertumbuhan Kabupaten adalah sektor bangunan sebesar 3,65 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,79 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2,69 %, sektor jasa-jasa sebesar 2,53 % dan sektor angkutan dan komunikasi tumbuh 2,24 % (BAPPEDA dan BPS Kab. Pati, 2004).

Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pati atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3.056.372,22 lebih tinggi dari tahun 2003 (Rp 2.840.834,48) Sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2003 pendapatan per kapita Kabupaten Pati sebesar Rp 857.494,58 kemudian berkembang pada tahun 2004 menjadi Rp 881.608,15 (BAPPEDA dan BPS Pati, 2004).

Dalam menghadapi persaingan global dan perdagangan bebas, maka seluruh pelaku ekonomi harus mampu menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing tinggi. Dalam pasar global standar produksi dan lingkungan harus memenuhi sertifikasi yang ditentukan. Oleh sebab itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat signifikan.

## **2. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan**

Masyarakat Kabupaten Pati dikenal sebagai masyarakat yang mudah menerima perubahan dan toleransinya tinggi terhadap perbedaan yang ada. Tekat untuk maju dan mandiri yang dimiliki sebagian besar masyarakat merupakan pendorong bagi pengembangan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari Sekda/Assisten/Bagian sebanyak 9 unit, Dinas 11 unit, Badan 4 unit, Kantor 7 unit, Kecamatan 21 unit, Desa/Kelurahan 405 unit dan UPTD 42 unit. Melalui berbagai kebijakan yang ada, menunjukkan kesiapan

untuk berperan serta dalam proses alih teknologi, mempunyai akses kuat dalam penentuan kebijakan dan memberi arah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat berperan sebagai pemanfaat dan pengguna teknologi.

Untuk mewujudkan masyarakat “melek budaya” plural/multicultural, maka diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mendukung penyeimbang media lintas sektor dan SARA. Oleh karena itu perlu penggalan “*local wisdom*” dan “*local genius*”

### **3. Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk Kabupaten Pati yang cukup besar (1.218.267 jiwa) dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat 133.938 orang, SMP/ sederajat 58.007 orang, SMA/ sederajat 31.452 orang merupakan potensi yang harus digarap, sehingga penduduk tersebut tidak menjadi beban pembangunan. Tersedianya banyak Lembaga Pendidikan, SD/ sederajat 894 buah, SMP/ sederajat 195 buah, SMA/ sederajat 67 buah dan PT 5 buah dengan seluruh aspek dan potensinya merupakan asset untuk pengembangan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (BAPPEDA dan BPS Pati, 2004).

### **4. Fisik dan Prasarana**

Tersedianya sarana perkantoran, teknologi informasi beserta perangkat lunaknya walaupun masih kurang, diharapkan mampu mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek. Fasilitas fisik prasarana ini dimiliki oleh Lembaga Penelitian yang berada dibawah Pemerintah Daerah, Departemen (instansi vertikal) maupun swasta, sehingga akan mendukung lancarnya pembangunan Iptek.

### **5. Sumber Daya Alam**

Kekayaan dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Pati yang sudah teridentifikasi yaitu jumlah jenis bahan tambang yang sudah dieksploitasi sebanyak 8 buah, luas lahan

kritis 40.472,36 Ha. Jumlah yang sudah memiliki IPAL UKL/UPL untuk industri besar 3 buah, industri menengah 3 buah, industri kecil 2 buah, Rumah Sakit 3 buah dan Pasar 1 buah, merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk lancarnya dan berhasilnya pembangunan yang berkelanjutan. Potensinya diidentifikasi melalui penelitian. Selanjutnya sumber daya alam tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kelestariannya dan lingkungan hidupnya.

#### **D. Tantangan Pembangunan**

Selain mempunyai kekuatan di berbagai sektor tersebut diatas, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Pati antara lain: (1) lemahnya struktur ekonomi yang disebabkan masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir serta antar sektor, (2) masih tingginya bahan baku dari luar untuk keperluan industri, sehingga tidak menguntungkan Kabupaten Pati, dan (3) lemahnya menghadapi tantangan global.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah juga disebabkan terjadinya krisis diberbagai bidang kehidupan pada akhir abad 20 yang lalu, ikut memperburuk kondisi perekonomian Kabupaten Pati. Walaupun Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan ekonomi positif, namun pertumbuhan tersebut belum mampu mengangkat dan mengejar ketinggalan serta pulih kembali seperti sebelum krisis.

Dibidang sosial budaya dan pemerintahan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya yang menyangkut pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan dengan daerah lain, merupakan tantangan untuk dijawab dengan melakukan kegiatan yang hasilnya mampu mendorong meningkatnya angka IPM sehingga Kabupaten Pati tidak lagi tertinggal dengan daerah lain.

Dibidang hukum dan hak asasi manusia, masih terdapat berbagai macam pelanggaran yang disebabkan kurang dipatuhinya ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang terlibat dalam penetapan ketentuan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelanggaran peratutran perundang-undangan akan mempengaruhi tertib masyarakat, sehingga perlu diciptakan suatu metode bagaimana masyarakat sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Di bidang pemerintahan masih adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di berbagai sektor, eksekutif dan legeslatif menjadi tantangan amat serius. Diperlukan adanya kebijakan publik untuk membrantas KKN, dengan memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan publik. Juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara disiplin dan profesional serta bebas KKN.

Di bidang politik, kesadaran rakyat akan politik makin meningkat dengan bergulirnya era demokrasi, sebagai akibat dari adanya reformasi disegala bidang. Sehingga pemerintah harus mengimbangi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dan seimbang dengan hak dan kewajibannya.

Di tingkat global, dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi membawa pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh yang positif dan nyata adalah kecepatan arus informasi yang pada gilirannya membawa pengaruh pada wawasan masyarakat mengenai berbagai hal. Sensor budaya yang kuat diperlukan agar tidak terjadi perubahan perilaku yang tidak menguntungkan kehidupan masyarakat. Secara positif, globalisasi akan memperluas pasar bagi produk Kabupaten Pati. Disamping itu juga dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan dan kepastian Kabupaten Pati dimasa depan.

## **BAB III**

### **PRINSIP DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS**

#### **A. Prinsip Dasar**

Pembangunan Iptek di Kabupaten Pati, khususnya Litbangrap Iptek dilaksanakan berdasarkan:

1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Keragaman dan kebinekaan;
3. Budaya eksplorasi dan inovasi berbasis Iptek;
4. Pendekatan dengan memperhatikan perkembangan Iptek lokal, Nasional dan global;
5. Hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, menghormati HAM dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
6. Partisipasi aktif semua mitra pembangunan dan masyarakat;
7. Kesetaraan dan keadilan jender;
8. Iptek strategis dengan mempertimbangkan kepentingan Nasional dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

#### **B. Visi**

Mengikuti kebijakan Iptek Nasional dan Propinsi Jawa Tengah serta sebagai bagian terpadu kebijakan pembangunan di Kabupaten Pati, maka visi Iptek Kabupaten Pati diharapkan tercapai pada tahun 2025, dinyatakan sebagai berikut: "Penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang manusiawi dan berwawasan lingkungan sebagai pilar utama

dalam pembangunan untuk meningkatkan peradaban, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati”

### **C. Misi**

Melaksanakan Litbangrap Iptek guna mewujudkan Iptek sebagai pilar utama pembangunan di Kabupaten Pati melalui:

1. Pengembangan Iptek Daerah yang manusiawi untuk peningkatan peradaban, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati;
2. Pemantapan kelembagaan dan manajemen Iptek di Kabupaten Pati dalam kemitraan semua pihak terkait dengan kegiatan Iptek;
3. Peningkatan jumlah dan mutu pelaksanaan Litbangrap Iptek;
4. Sinkronisasi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek untuk mendukung pengembangan industri berbasis keunggulan sumberdaya lokal.

### **D. Tujuan Strategis**

Pembangunan bidang Iptek khususnya penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di Kabupaten Pati ditujukan pada pencapaian hal-hal sebagai berikut:

1. Ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan

Meningkatkan penerapan Iptek dalam pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Pati berbasis sumber daya lokal.

2. Kondisi sosial budaya daerah berbasis Iptek

Mengembangkan peradaban, kesadaran budaya Iptek yang rasional, produktif serta ramah lingkungan dalam rambu jati diri dan akar budaya masyarakat.

3. Menata dan memantapkan kelembagaan Iptek daerah dalam kemitraan antara semua pihak terkait kegiatan Litbangrap Iptek.

4. Kemandirian dan keunggulan Iptek daerah

Mengembangkan prioritas Litbangrap Iptek untuk kemandirian berbasis pada potensi unggulan lokal.

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK (UMUM)**

### **A. Landasan dan Kerangka Kerja**

Landasan kerja ditetapkan berdasarkan kajian cermat atas perkembangan global Iptek, khususnya dalam aspek ketersediaan energi jangka panjang dikaitkan dengan keterbatasan energi bersumber fosil serta ketahanan pangan dalam keseimbangan populasi dan sumber daya alam serta pengembangannya. Pengembangan teknologi informasi dan bioteknologi juga dicermati penerapannya dan dirancang agar pemanfaatannya optimal tanpa resiko gangguan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat.

Kerangka kerja untuk pelaksanaan Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati disusun sebagai berikut:

1. Melengkapi produk-produk hukum, mengikuti pengembangan produk hukum Nasional dan kecenderungan global, sebagai landasan pembangunan Iptek jangka panjang;
2. Menyempurnakan Iptek daerah dan melaksanakan pembangunan Iptek jangka menengah;
3. Mensinkronisasikan kegiatan Litbangrap Iptek;
4. Pengembangan industri kecil dan menengah berbasis Iptek.

### **B. Kebijakan Umum Litbangrap Iptek**

Berbasis pada kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan Jakstra Litbangrap Iptek, maka ditetapkan beberapa kebijakan pembangunan Iptek Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Pembangunan Iptek Kabupaten Pati merupakan bagian terpadu dari keseluruhan pembangunan Iptek Propinsi Jawa Tengah dan Nasional;



2. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Pati, pembangunan Iptek adalah merupakan bagian terpadu dari keseluruhan pembangunan Kabupaten Pati;
3. Pembangunan Iptek dilaksanakan oleh semua pihak, semua unit dan unsur dalam pemerintahan Kabupaten Pati, unit-unit Litbangrap Iptek, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan masyarakat seluruhnya; kesemuanya dalam suatu jaringan kemitraan yang berdaya guna dan berhasil guna; disatu sisi sebagai pilar utama pembangunan, dan disisi lain sebagai ukuran tingkat pencapaian tujuan pembangunan;
4. Pembangunan Iptek dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan daerah, secara umum sebagai berikut:
  - a. Tahap I: Tahap Survival (2006-2011), Iptek dijadikan pilar utama pembangunan, sesuai dengan tahapan Pembangunan Kabupaten Pati;
  - b. Tahap II: Tahap Penguasaan Iptek (2012-2017), daya saing Iptek daerah dan horisontal meningkat dalam berbagai aspek pembangunan;
  - c. Tahap III: Tahap Peradaban Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat (2018-2028) berdasarkan Iptek yang manusiawi dan berwawasan lingkungan.

### **C. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja kuantitatif untuk pencapaian Visi Iptek Kabupaten Pati 2028 dipilih sesuai dengan pentahapan pembangunan bidang Iptek sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Untuk tahap I: Tahap *survival* (2006-2011), adalah sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Input indicator*):
  - a. Rasio SDM Iptek mencapai 20 per 10.000 penduduk;
  - b. Anggaran Litbangrap Iptek mencapai 1 % dari APBD;
  - c. Kontribusi anggaran Litbangrap Iptek dari sektor swasta non pemerintah 30 % dari anggaran Litbangrap Iptek Pemerintah.

2. Indikator Proses (*Proses indicator*):
  - a. Fondasi Litbangrap Iptek dalam Agroindustri spesifik Kabupaten Pati;
  - b. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis Iptek sebesar 10 % dari keseluruhan UKM yang ada;
3. Indikator keluaran (*Output indicator*)
  - a. Jumlah publikasi ilmiah sebesar 10 % penelitian yang ada;
  - b. Paten sebanyak 0,1 % dari semua penelitian yang ada.
4. Indikator hasil (*Outcome indicator*)
  - a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pati, dan indeks Pencapaian Teknologi sebesar 0,20;
  - b. Rasio ekspor berbasis teknologi terhadap keseluruhan ekspor sebesar 0,20.

Indikator kinerja Litbangrap Iptek dalam tahap II dan tahap III seyogyanya ditetapkan dalam setiap penyusunan Jakstra Litbangrap Iptek 5 dan 10 tahun yang akan datang dengan mendasarkan pada keberhasilan Jakstra Litbangrap Iptek tahap I.

#### **D. Wahana Pencapaian**

Pelaksanaan Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati dilakukan melalui Prioritas Utama Litbangrap Iptek Kabupaten Pati yang terdiri dari tiga bidang/wilayah pembangunan (ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, fisik dan prasarana wilayah) berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya alam, manusia dan merupakan potensi yang diharapkan memiliki daya ungkit dan nilai yang besar dan layak dilakukan;
2. Menyangkut hajat orang banyak, merupakan wilayah kerja dari sebagian masyarakat Kabupaten Pati;
3. Dalam rambu nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kabupaten Pati.

Dalam bab berikutnya akan dijabarkan Litbangrap Iptek dalam ketiga bidang/wilayah pembangunan tersebut.

## **BAB V**

# **KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK DALAM BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN**

### **A. Ekonomi**

#### **1. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan**

##### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pati sebanyak 2.085 pekerja, khususnya dipedesaan, menggantungkan hidup dari sektor pertanian, termasuk didalamnya pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat dan kehutanan. Pada umumnya mereka berpendidikan rendah yaitu berpendidikan SD sebanyak 1.204 pekerja dengan akses informasi yang terbatas, sehingga penyerapan teknologi juga rendah. Produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian juga rendah karena masih berkuat pada produk primer. Sementara itu luas lahan pertanian 58.739 Ha kian berkurang dan terbatas, sarana dan prasarana produksi kurang, ketidakmampuan dalam mengakses permintaan pasar serta kelembagaan pertanian juga masih lemah menyebabkan kondisi pertanian relatif lambat kemajuannya.

Secara makro ketahanan pangan rakyat Kabupaten Pati cukup baik dengan ditandai produksi padi 499.488 ton tahun 2004, namun secara mikro banyak keluarga yang masih berada di bawah garis kemiskinan yaitu sebanyak 123.204 jiwa (KBKS, 2004). Oleh sebab itu perlu memperhatikan peningkatan mutu hasil padi dan efisiensi biaya usahatani.

Untuk sektor peternakan, potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pati cukup besar yaitu sapi potong 61.871 ekor, sapi perah 188 ekor, kerbau 2.252 ekor, domba 26.005 ekor, kambing 106.225 ekor, ayam ras 62.304 ekor dan ayam buras

1.310.432 ekor (BPS Pati, 2004) dan mampu mencukupi kebutuhan daging, susu dan telur seluruh masyarakat bahkan dapat dijual keluar daerah. Hanya potensi peternakan yang ada masih belum dibudidayakan secara optimal.

Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Pati cukup besar dengan ditandai produksi ikan 53.002.752 kg dengan nilai jual Rp 161.251.469.000 (BPS Pati, 2004), baik sumber hayati (ikan) maupun non hayati. Beberapa komodite perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi antara lain udang, bandeng, teri, rajungan dan ikan tangkapan lain. Pemanfaatan sumber daya perikanan masih berpeluang untuk dikembangkan.

Sementara itu bidang perkebunan juga mempunyai potensi yang dapat dibanggakan, ini dapat dilihat pada produksi komoditas perkebunan seperti kelapa seanyak 21.257.095 butir, kelapa kopyor sebanyak 298.279 butir, kopi 478.058 biji kg, kapuk randu 8.370.708 kg, cengkeh 145.275 kg dan tebu 31.481.300 ton gula (BPS Pati, 2004)

Luas lahan hutan di Kabupaten Pati 18,416 Ha dan hutan rakyat 226 Ha, kerusakan hutan semakin meluas "*illegal logging*" (penjualan kayu dari penebangan liar), konflik petani dengan pengelola hutan cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Beberapa permasalahan dalam pengembangan Litbangrap Iptek dibidang pertanian adalah banyaknya hasil-hasil penelitian yang kurang aplikatif, kurangnya koordinasi antara peneliti dengan pengguna, kurangnya sosialisasi hasil penelitian dan sedikitnya penelitian dibidang *off farm*.

#### **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Untuk mendukung kebijakan strategis pembangunan bidang pertanian, maka kebijakan strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk memberdayakan kelompok

tani/nelayan dan petani/nelayan, meningkatkan agrobisnis dan agroindustri, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta pengembangan model tata niaga hasil pertanian yang memihak petani, sebagai bagian dari pencapaian pembangunan pertanian tangguh berbasis sumberdaya lokal.

**c. Program Litbangrap Iptek**

Program Litbangrap Iptek bidang pertanian (pertanian pangan, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat dan kehutanan) adalah:

1. Model pemberdayaan petani/nelayan, dalam bidang-bidang pengetahuan dan ketrampilan serta penguasaan teknologi pertanian, revitaliasi kelompok tani/nelayan, pembiayaan usaha pertanian, pengembangan agrobisnis dan agroindustri;
2. Pengembangan potensi unggulan lokal produk pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
3. Penggunaan bibit/benih unggul, teknologi produksi dan teknologi hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
4. Pengembangan informasi produksi pertanian yang mudah diakses petani;
5. Pengembangan usahatani terpadu dan teknologi pertanian organik;
6. Pengembangan tata niaga hasil pertanian yang mudah diakses oleh dan memihak petani;
7. Penelitian dan pengembangan komoditas agro sebagai bahan baku Industri Kecil Menengah (IKM).

**2. Perindustrian dan Perdagangan**

**a. Kondisi dan Permasalahan**

Terjadi peningkatan yang nyata kegiatan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Pati dalam 2-3 tahun terakhir ini, terlihat pada data berikut ini yaitu

jumlah industri besar 19, industri sedang 168, jumlah investor 68, pasar tradisional/rakyat 169, pasar modern/mall 3, pasar hewan 4, jumlah lembaga keuangan bank 8, jumlah keuangan non bank 481 (BPS Pati 2004), dan toko 10.318 (Indag, 2004). Nilai produksi meningkat, namun para pelaku industri dan perdagangan masih menghadapi berbagai kendala antara lain prioritas penggunaan bahan baku potensi unggulan daerah masih rendah, penggunaan teknologi kurang, serta jaringan informasi dan rantai distribusi produk masih lemah dan kurang efisien.

**b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek dalam bidang perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk peningkatan penggunaan bahan baku produk unggulan lokal, penguasaan teknologi tepat guna dan pengendalian tataniaga.

**c. Program Litbangrap Iptek**

Untuk memenuhi kebijakan Litbangrap Iptek di bidang perindustrian dan perdagangan, maka program-program Litbangrap Iptek meliputi:

1. Pemetaan potensi unggulan bahan baku industri di Kabupaten Pati;
2. Pengembangan model pemberdayaan pelaku industri dan perdagangan dalam bidang-bidang ketrampilan, penguasaan teknologi dan permodalan;
3. Pengembangan model tata niaga hasil produksi.

**3. Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal**

**d. Kondisi dan Permasalahan**

Keberadaan Koperasi sebanyak 481 buah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat strategis dalam mendukung kekuatan perekonomian Kabupaten Pati, jumlah dan potensi kian meningkat, mencakup asset, jumlah tenaga kerja dan volume usaha. Pengembangan koperasi juga menunjukkan kenaikan yang nyata dalam jumlah, asset dan volume usahanya. Sementara itu penanaman modal juga

menunjukkan peningkatan yang berarti. Peningkatan penanaman modal skala kecil lebih nyata dari pada peningkatan penanaman modal skala industri-industri besar.

Namun masih ada beberapa masalah, antara lain rendahnya teknologi produksi, kualitas produk rendah, lemahnya daya saing UKM dan koperasi, rendahnya akses informasi, permodalan, serta kurang berfungsinya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lain. Sementara itu, berbagai faktor pendukung iklim investasi, seperti sarana prasarana dan peraturan hukum dirasa masih kurang.

**e. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Kebijakan strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk meningkatkan peran koperasi, UKM dan usaha kecil mikro dalam pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan kelembagaan, permodalan, peningkatan penguasaan teknologi dan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha lain serta peningkatan kemudahan investasi.

**f. Program Litbangrap Iptek**

Program yang akan dilakukan dalam melaksanakan kebijakan strategis tersebut adalah:

1. Model pemberdayaan pelaku koperasi dan UKM dalam pengetahuan dan ketrampilan, kelembagaan, penguasaan desain, teknologi dan permodalan;
2. Pengembangan model kemitraan koperasi dan UKM dengan pelaku usaha dan industri besar, serta model tataniaga produk koperasi dan UKM;
3. Pengembangan model Sistem Informasi Terpadu Koperasi dan UKM;
4. Penguatan permodalan IKM/UKM;
5. Penelitian dan Pengembangan model sentra IKM/UKM.



## **B. Sosial Budaya dan Pemerintahan**

### **1. Hukum, HAM dan Kamtibmas**

#### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Prioritas pembangunan adalah untuk mewujudkan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal. Namun berbagai kendala ditemukan dalam penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Pati, antara lain masih rendahnya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dan penghargaan terhadap HAM, belum lengkapnya produk hukum (nasional dan daerah) dalam merespon pelaksanaan otonomi daerah, masih rendahnya kesadaran, kepatuhan hukum dan pengembangan budaya hukum, serta masih rendahnya sarana dan prasarana hukum. Bidang Kamtibmas, jumlah kasus pelanggaran hukum berdasarkan Perda tahun 2004 sebanyak 198 kasus dan jumlah kejadian konflik di masyarakat sebanyak 34 kasus pada tahun 2004.

Sementara itu peranan PNS dalam perlindungan masyarakat (Linmas) dan keamanan serta ketertiban masyarakat belum mantap, terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Berbagai permasalahan masih menjadi beban, antara lain adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme, dan masih lemahnya pemahaman tentang Pancasila, dalam era penuh tantangan ini adanya konflik sosial dan disintegrasi Nasional.

#### **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek diarahkan pada peningkatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran dan budaya hukum, serta pembenahan proses penyusunan produk hukum daerah. Sedang

untuk Kamtibmas diarahkan pada optimalisasi rasa aman masyarakat, peningkatan rasa nasionalisme dan partisipasi masyarakat dalam Kamtibmas.

### **c. Program Litbangrap Iptek**

Untuk pencapaian tujuan tersebut diatas, maka program Litbangrap Iptek adalah:

1. Kajian faktor determinan penegakan hukum, penerapan hukum dan Kamtibmas;
2. Pengembangan model budaya hukum;
3. Pengembangan model Kamtibmas berbasis masyarakat sesuai perundangan yang berlaku;
4. Kajian evaluasi peranan PNS dalam perlindungan masyarakat (Linmas) dan Kamtibmas;

## **2. Politik**

### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Pelaksanaan pembangunan bidang politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini antara lain disebabkan belum mantapnya komunikasi interpersonal dari segenap komponen masyarakat, pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih adanya konflik internal Parpol, dan bertambahnya jumlah Parpol yaitu sebanyak 22 peserta Pemilu tahun 2004. Kondisi ini makin mendesak untuk memperoleh perhatian, utamanya dalam menghadapi Pilkada secara langsung tahun 2006 di Kabupaten Pati sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Hal lain yang menghambat pembangunan bidang politik adalah adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik perempuan dan peningkatan tuntutan

masyarakat terhadap peran lembaga Legislatif sebagai wahana representasi politik masyarakat.

#### **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Dalam rangka menaggulangi permasalahan tersebut diatas, maka Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat dan efektivitas politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Pati.

#### **c. Program Litbangrap Iptek**

Untuk implementasi kegiatan tersebut, maka program Litbangrap Iptek adalah:

1. Kajian budaya politik lokal;
2. Pengembangan model pendidikan elit Parpol;
3. Pengembangan model pendidikan politik untuk rakyat;
4. Kajian efektivitas dan faktor determinan keberhasilan pranata politik daerah;
5. Kajian kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan PILKADA langsung.

### **3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

#### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Penduduk Kabupaten Pati sejumlah 1.218.267 orang. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar adalah SD/ sederajat yaitu 114.105 orang, SMP/ sederajat 62.782 orang, SMA/ sederajat 71.197 orang (BPS Pati, 2004) meskipun mengalami kemajuan tetapi kondisinya masih memprihatinkan. Struktur penduduk mengalami perubahan dan mengarah pada struktur penduduk tua (> 55 th sebanyak 150.517 orang). Keikutsertaan KB cukup menggembirakan, tetapi manajemen dan informasi kependudukan belum cukup mantap. Sementara itu jumlah tenaga kerja (SMA

keatas) sebanyak 8.519 orang, jumlah penduduk yang bekerja 615.070 orang jumlah penduduk yang mencari kerja 19.007 orang, jumlah penduduk yang menganggur 52.587 orang dan jumlah angkatan kerja 667.657 orang (Disnakertrans, 2004).

#### **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Untuk menanggulangi masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan tersebut, maka Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek dibidang kependudukan diarahkan pada penyiapan keluarga sejahtera sejak usia remaja, pemberdayaan keluarga miskin, penyusunan pengelolaan dan informasi kependudukan. Sedang Litbangrap Iptek untuk bidang ketenagakerjaan diarahkan peningkatan mutu tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya yang bekerja diluar negeri.

#### **c. Program Litbangrap Iptek**

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut diatas, maka program Litbangrap Iptek adalah:

1. Pengembangan model pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
2. Pengembangan model pengelolaan dan informasi kependudukan;
3. Pengembangan model pemberdayaan keluarga miskin;
4. Pemetaan tenaga kerja dalam berbagai sektor industri dan perdagangan;
5. Pengembangan model manajemen terpadu tenaga kerja khususnya ke luar negeri (mencakup perencanaan, pelatihan, pengiriman dan perlindungan).

### **4. Pendidikan, Kebudayaan, Generasi Muda dan Olahraga**

#### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Angka partisipasi pendidikan, SD/ sederajat 132.850 orang, SMP sederajat 58.956 orang, SMA sederajat 21.157 orang, khususnya pada tingkat SMP/ sederajat ke atas masih relatif rendah. Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan ketrampilan luar sekolah juga masih rendah. Pemerataan pendidikan juga tidak

seimbang. Seiring dengan otonomi pendidikan, muncul kecenderungan tingginya biaya pendidikan pada level pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Disadari pula bahwa kecenderungan pada penguasaan pengetahuan secara kognitif dalam penyelenggaraan pendidikan kita mengakibatkan aspek pembentukan kepribadian dan budi pekerti luhur menjadi kurang diperhatikan. Penyelenggaraan pendidikan non formal belum optimal, kualitas pelaksanaan dan hasil pendidikan juga masih rendah.

Demikian juga, relevansi pendidikan dengan pasar masih rendah. Disisi lain, ada pula perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta dan antara pendidikan sekolah dengan madrasah.

Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pati dikenal luas sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral. Dalam menghadapi “gempuran” budaya luar, berbagai masalah muncul, antara lain berkurangnya apresiasi bahasa, sastra dan kesenian daerah, rendahnya pemanfaatan perpustakaan dan sumberdaya informasi kebudayaan serta rendahnya upaya pemanfaatan dan pelestarian aset budaya.

Secara relatif, telah terjadi peningkatan kesiapan generasi muda sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, terkait dengan peningkatan derajat pendidikan dan peningkatan aset informasi. Namun masih dirasakan adanya berbagai kendala, antara lain semakin meningkatnya kenakalan dan pelaku kriminal dikalangan pemuda, belum berkembangnya kegiatan sosial pemuda yang positif serta belum mantapnya lembaga pembinaan pemuda.

Berbagai prestasi olah raga dicapai putra-putri Kabupaten Pati, namun prestasi tersebut masih kurang memadai. Sementara itu upaya memasyarakatkan olahraga berkembang, namun belum mencapai taraf optimal. Berbagai masalah mendasar

dapat diidentifikasi ialah lemahnya kapasitas lembaga serta upaya pembinaan dan pembibitan olahragawan, masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga serta belum membudayanya kebutuhan olah raga sebagai bagian pola hidup masyarakat.

**b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Kabupaten Pati, maka Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar, manajemen pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Sementara itu untuk membantu generasi muda mempersiapkan diri, Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk pembinaan pemuda kearah produktivitas, dalam kelembagaan yang mantap dengan partisipasi masyarakat secara luas.

Sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan, Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek diarahkan pada peningkatan apresiasi bahasa, sastra dan kesenian daerah, pemanfaatan sumberdaya kebudayaan serta pelestarian asset budaya.

Sedangkan Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek peningkatan budaya olahraga diarahkan untuk pengembangan pembibitan dan pembinaan olahragawan serta pemasyarakatan olahraga dikalangan masyarakat.

**c. Program Litbangrap Iptek**

Program Litbangrap Iptek yang disarankan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan model pendidikan budipekerti di sekolah;
2. Pengembangan model pendidikan bagi masyarakat miskin;
3. Pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
4. Pengembangan model pendidikan luar sekolah, bahasa, apresiasi sastra dan kesenian daerah;

5. Pemetaan cagar budaya;
6. Pengembangan model pembinaan pemuda produktif dalam wadah kelembagaan dengan partisipasi masyarakat;
7. Kajian evaluasi pola pembibitan dan pembinaan olahragawan dalam konteks sarana dan prasarana yang tersedia, dikaitkan dengan partisipasi masyarakat.

## **5. Kesehatan**

### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Derajat kesehatan di Kabupaten Pati menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti dilihat dari berbagai indikator. Namun beberapa penyakit infeksi masih mengancam masyarakat, antara lain demam berdarah, malaria, *tuberculosis*, kusta. Penanggulangan penyakit menular dan kejadian luar biasa dirasakan belum optimal.

Jumlah dan kondisi sarana pelayanan kesehatan, Rumah Sakit 7, Rumah Bersalin 13, Poliklinik 37, Puskesmas 29, Apotik/Toko Obat 45, Polindes 198 sementara itu tenaga kesehatan, Dokter 73, Bidan 293, Perawat/Paramedis 436, melihat data tersebut sebenarnya sudah cukup memadai. Upaya pendirian Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) bersinergi dengan pendirian Warung Obat Desa (WOD) memperlluas cakupan pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat relatif baik, namun penegakan peraturan perundang-undangan dibidang farmasi masih sangat lemah, termasuk belum dikembangkannya standarisasi obat asli Indonesia. Sementara kesehatan lingkungan sehat masih belum memuaskan.

### **b. Kebijakan Litbangrap Iptek**

Kebijakan Litbangrap Iptek bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas lingkungan, penanganan penyakit menular dan KLB, juga peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di PKD-WOD, Puskesmas maupun rumah sakit, serta pengembangan perilaku hidup sehat.

### **c. Program Litbangrap Iptek**

Program Litbangrap Iptek bidang kesehatan yang disarankan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Pemetakan wilayah rawan penyakit menular dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
2. Pengembangan model penanggulangan penyakit menular dan KLB berbasis masyarakat dengan dukungan semua pihak terkait;
3. Pengembangan dan pemerataan pelayanan kesehatan berbasis PKD-WOD dengan rujukan yang handal;
4. Pengembangan model peningkatan perilaku hidup sehat diberbagai kelompok masyarakat.

## **6. Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja**

### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Majunya pembangunan di Kabupaten Pati secara tidak langsung berdampak pada perubahan tuntutan masyarakat dan fenomena ini melahirkan berbagai masalah sosial. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ketimpangan gender di Kabupaten Pati saat ini masih cukup tinggi, sebagaimana terlihat dari ketimpangan angka melek huruf dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki karena rendahnya akses perempuan dan kemampuan mereka. Ketimpangan makin besar dengan banyaknya kasus kekerasan kepada perempuan dalam rumah tangga dan juga dipasar tenaga kerja.

Akibat kemiskinan, orang tua memperkerjakan anak-anak mereka, dalam situasi tanpa perlindungan sama sekali. Mereka menjadi korban eksploitasi ekonomi, sasaran kekerasan, korban narkoba dan seksualitas. Beberapa panti asuhan sebanyak



29 buah dan Panti cacat sebanyak 1 buah, serta Penampungan WTS sebanyak 1 buah telah tersedia, beberapa program dilaksanakan, namun kecenderungan pekerja anak, anak terlantar dan eksploitasi anak cenderung meningkat.

**b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka kebijakan Litbangrap Iptek dalam bidang ini diarahkan untuk pengembangan kebijakan *komprehensif* penanganan PMKS, pemberdayaan perempuan mencakup perlindungan, peningkatan akses informasi dan pengutamaan jender dalam keseluruhan pembangunan, penguatan kelembagaan dalam menangani masalah anak dan remaja, perlindungan pekerja anak dan remaja, serta pengembangan partisipasi masyarakat, swasta, dalam penanggulangan masalah sosial, perempuan serta anak dan remaja.

**c. Program Litbangrap Iptek**

Program Litbangrap Iptek pada bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, anak dan remaja adalah:

1. Pemetaan PMKS termasuk anak dan remaja;
2. Pengembangan pola partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah-masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan pengayoman anak dan remaja;
3. Pengembangan manajemen pengelolaan panti berbasis kemampuan lokal dan berbasis masyarakat setempat;
4. Pengembangan model perlindungan hukum tenaga kerja perempuan, anak dan remaja.

## **7. Agama**

### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Agama memiliki nilai penting dalam melandasi watak dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai masyarakat *religiøs*. Tingkat keberagaman formal cukup baik dinilai dari keguyuban dalam beribadah. Namun disadari bahwa penghayatan dan pengamalan agama belum menyentuh pada esensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan belum menjadi kerangka landasan bagi prasktek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan masyarakat.

Secara kuantitatif di Kabupaten Pati memiliki cukup sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan keagamaan serta kelembagaan masyarakat untuk berbagai ragam agama, seperti masjid sebanyak 869, Mushola/Langgar 3.595, gereja 119, Vihara 27 dan Pure 1. Namun fungsi dan peranan kelembagaan tersebut, termasuk lembaga-lembaga pendidikan belum optimal.

Kemajemukan agama, dengan Islam sebagai mayoritas, adalah di satu sisi, namun bisa berpotensi besar bagi terjadinya konflik dan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat mengganggu integritas bangsa.

### **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Untuk menghadapi berbagai masalah dibidang agama tersebut, Litbangrap Iptek diarahkan pada semakin mantapnya fungsi dan peran agama serta lembaga agama termasuk lembaga pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keadaan harmonis.

### **c. Program Litbangrap Iptek**

Program Litbangrap Iptek bidang agama meliputi:

1. Penyusunan model partisipasi lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat;

2. Kajian optimalisasi peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial;
3. Evaluasi terhadap pendidikan agama disekolah.

## **8. Aparatur Pemerintah**

### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Potensi yang dimiliki bidang aparatur pemerintah Kabupaten Pati pada saat ini adalah PNS (termasuk GTT/PTT) sebanyak 15.075 orang dengan proporsi pendidikan SD/ sederajat 465 orang, SMP/ sederajat 685 orang, SMA/ sederajat 7.719 orang, D3 932 orang, S1 2.314 orang, S2/S3 155 orang dan profesionalisme yang masih agak timpang, cenderung rendah dan tidak profesional.

Sementara itu tuntutan masyarakat akan profesionalisme kinerja lembaga dan aparatur pemerintah daerah semakin besar, dalam kerangka keinginan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan serta pembangunan yang partisipatif.

Masih banyak masalah yang dihadapi dalam realisasi peningkatan kinerja tersebut, antara lain masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, masih belum efektifnya pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu lemahnya pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan.

### **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Kebijakan Litbangrap Iptek dalam bidang pembangunan aparatur pemerintah daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah serta peningkatan manajemen pemerintahan dan pembangunan untuk mendukung terwujudnya *Good governance*.

### c. Program Litbangrap Iptek

Program Litbangrap Iptek bidang pembangunan aparatur pemerintah adalah:

1. Penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja profesional aparatur pemerintah Kabupaten Pati;
2. Pengembangan model peningkatan mutu profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Pati;
3. Evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah Kabupaten Pati;
4. Pengembangan model kompetensi, *Assesment Center* dan pelayanan informasi melalui internet.

## 9. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Kondisi dan Permasalahan

Meskipun implemetasi otonomi daerah telah berlangsung lima tahun, namun partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan relatif masih rendah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, antara lain pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai Undang-undang No 22 tahun 1999, Pembinaan pondok pesantren, pembinaan TP.PKK, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat.

Upaya tersebut masih menghadapi berbagai masalah, antara lain masih rendahnya akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, belum optimalnya pembagian wewenang dan sumberdaya dari pemerintah dan sektor swasta kepada masyarakat, masih lemahnya jaringan informasi dan komunikasi masyarakat, serta kurang mantapnya perencanaan program pemberdayaan masyarakat.

## **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Litbangrap Iptek dibidang pemberdayaan masyarakat diarahkan pada akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi kapasitas lembaga masyarakat dan fungsi lembaga ekonomi masyarakat, peningkatan akses informasi dan komunikasi lembaga komunikasi masyarakat, serta pemantapan perencanaan program pemberdayaan masyarakat.

## **c. Program Litbangrap Iptek**

Program Litbangrap Iptek dibidang pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Pengembangan model partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pengambilan keputusan publik;
2. Pengembangan model pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat;
3. Pengembangan model kemitraan kelompok ekonomi kuat dengan kelompok ekonomi lemah;
4. Evaluasi kinerja Lembaga-lembaga Ekonomi Masyarakat.

## **10. Pelaksanaan Otonomi Daerah**

### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan sejak tahun 2001, telah membawa perubahan sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Namun belum efektif karena berbagai masalah, antara lain munculnya egoisme sektoral, belum efektifnya kerjasama antar daerah, masih tumpang tindihnya beberapa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta masih banyaknya anggaran sektoral yang ditahan di pusat, adanya duplikasi tupoksi antar institusi yang ada.

## **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kebijakan Strategis Litbangrap Iptek dalam pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk pencapaian kemandirian daerah secara berkesinambungan.

## **c. Program Litbangrap Iptek**

Program Litbangrap Iptek dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan otonomi daerah;
2. Evaluasi kerjasama antar daerah.

# **11. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

## **a. Kondisi dan Permasalahan**

Sejak diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, upaya penyelarasan, percepatan pencapaian, penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan Iptek dimulai, namun masih belum cukup memadai. Peran lembaga Litbangrap Iptek belum optimal, sementara jaringan dan kerjasama antar lembaga belum efektif. Berbagai lembaga cenderung memusatkan kajian untuk kepentingan internal masing-masing. Peran sektor swasta dalam Litbangrap Iptek belum digali. Mutu hasil penelitian belum tinggi, belum layak mendapatkan HKI, serta belum dapat dipakai untuk penentuan kebijakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan *stakeholders* lain. Regulasi dan legislasi untuk menumbuhkan iklim yang kondusif terhadap penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan Iptek juga belum cukup menjanjikan.

Kemajuan Iptek akan membawa dampak dalam budaya bangsa, oleh karena itu penerapan teknologi senantiasa harus diikuti dengan pengembangan budaya daerah yang khas.

**b. Kebijakan Strategis Litbangrap Bidang Iptek**

Kebijakan strategis Litbangrap dalam bidang Iptek di Kabupaten Pati diarahkan pada peningkatan peran dan mutu Lembaga Litbangrap Iptek, pengembangan jaringan kerjasama antar peneliti dan antar Lembaga Litbangrap Iptek, Pelibatan Dewan Riset Daerah (DRD), pelibatan sektor swasta serta peningkatan regulasi dan legislasi untuk menumbuhkan iklim yang kondusif Litbangrap Iptek.

**c. Program Litbangrap Bidang Iptek**

Untuk mewujudkan program Litbangrap Bidang Iptek adalah:

1. Penelitian tentang kinerja Lembaga Litbangrap Iptek;
2. Pengembangan model jaringan antar peneliti, antar Lembaga Litbangrap Iptek dan Dewan Riset Daerah (DRD);
3. Pengembangan model pelatihan metodologi penelitian untuk peneliti dan manajemen penelitian untuk Lembaga Litbangrap Iptek;
4. Pengembangan model peningkatan peran serta sektor swasta dalam Litbangrap Iptek;
5. Pelatihan penulisan artikel ilmiah hasil penelitian.

## C. Fisik

### 1. Sumber Daya Air dan Irigasi

#### a. Kondisi dan Permasalahan

Pada umumnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) semakin buruk dikarenakan penebangan hutan yang tidak terkendali, perubahan lahan hutan menjadi persawahan, pemukiman dan alih fungsi lahan di "*upper water shed*" dan "*land use*" hilir. Hal ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan peneanaan sanksi bagi pelanggar sempadan sungai. Kondisi ini mengakibatkan daerah resapan berkurang sehingga saat musim hujan di beberapa wilayah terjadi banjir dan di musim kemarau terjadi kekeringan yang semakin meluas.

Hal lain yang memprihatinkan ialah menurunnya kondisi, kapasitas dan kualitas aliran sungai, karena kapasitas sungai dalam menampung aliran hujan berkurang dengan bertambahnya sedimen, sedang pemeliharaan daerah milik sungai sering kali terdesak oleh pemukiman utamanya dibantaran sungai. Disamping itu, dengan adanya erosi dari hulu menimbulkan *suspended load* yang mengakibatkan kualitas air berkurang dan terjadi sedimentasi. Demikian juga berkembangnya industri menimbulkan limbah yang memperburuk kualitas air.

Sementara itu fungsi sarana dan prasarana irigasi menurun, karena pemeliharaan yang kurang baik. Adanya banjir dan kerusakan yang diakibatkannya, serta pencurian air pada saluran sekendair atau tersier memperparah keadaan sumber daya air dan irigasi. Pada sisi yang lain potensi mata air belum teridentifikasi dan optimal pemanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan air minum, irigasi dan industri. Pengaturan pemanfaatan sumber air di kawasan DAS juga masih belum sesuai dengan peruntukannya.



Potensi sumber air bawah tanah belum teridentifikasi secara akurat sehingga pengendalian ijin usaha pemanfaatannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan terhadap pengambilan air bawah tanah juga masih lemah dan belum efektif.

**b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Kebijakan Litbangrap Iptek dibidang Sumber Daya Air dan pengairan diarahkan untuk perbaikan daerah serapan secara terpadu pada DAS, peningkatan kapasitas sungai dan kualitas air, pengendalian banjir, penyediaan air baku serta peningkatan sumber daya manusia petani dalam pengelolaan irigasi.

**c. Program Litbangrap Iptek**

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, maka program Litbangrap Iptek yang diperlukan adalah:

1. Pengembangan model penanganan DAS secara terpadu;
2. Pengembangan model pola tanam yang efisien dalam penggunaan air;
3. Pengembangan model peningkatan kapasitas sungai dan kualitas air;
4. Pemutakhiran pedoman operasional dan pemeliharaan infrastruktur waduk, bendung dan jaringan irigasi.

**2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

**a. Kondisi dan Permasalahan**

Wilayah Kabupaten Pati seluas 150.368 Ha dalam keanekaragaman sumber daya alam yang tinggi. Sementara lahan kritis yang ada mencapai 40.742,36 Ha Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Volume sampah semakin meningkat, termasuk yang menimbulkan beban cemaran BOD dan COD. Pencemaran udara dari berbagai sumber bergerak dan tidak bergerak juga cenderung meningkat, terutama didaerah perkotaan/industri, bencana

alam semakin sering dan meluas karena kerusakan ekosistem akibat ulah manusia. Sengketa lingkungan semakin meluas.

Beberapa kelebihan dan program dilaksanakan, namun belum cukup optimal memelihara sumber daya alam dan menjaga lingkungan sehat. Berbagai masalah masih dihadapi, antara lain kurang memudahinya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, belum dilaksanakan perencanaan terpadu dalam pengelolaan lingkungan hidup, perangkat hukum dan kapasitas lembaga pengelolaan lingkungan masih kurang memadai, serta komitmen dan dukungan pembiayaan untuk pemulihan lingkungan masih kurang memadai.

**b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk mengatasi kerusakan ekosistem, mengantisipasi bencana alam, memperbaiki kontrol kualitas udara, serta mencari bentuk optimal pengelolaan lingkungan, regulasi, SDM dan kelembagaan.

**c. Program Litbangrap Iptek**

Untuk merealisasi kebijakan tersebut, program Litbangrap Iptek, sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi, pengembangan, pemanfaatan dan teknologi sumber daya alam;
2. Pemetaan kerusakan ekosistem wilayah, faktor determinan dan alternatif penanggulangannya;
3. Pemetaan lokasi potensi pencemaran udara, faktor determinan dan alternatif penanggulangannya;
4. Pengembangan model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang melibatkan semua *stakeholders*.

### **3. Sumber Daya Kelautan**

#### **a. Kondisi dan Permasalahan**

Kabupaten Pati memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 60 km. Mulai dari Kecamatan Dukuhseti diujung utara sampai Kecamatan Batangan diujung timur yang memiliki potensi sumber daya kelautan bernilai ekonomis. Potensi tersebut bervariasi baik biota berpotensi ekonomi, maupun non biota dengan potensi ekonomi pula.

Fenomena alam bahari, seperti terjadinya *abrasi* maupun *akresi* pada lokasi-lokasi tertentu. *Akresi* atau *sedimentasi* menghalangi alur pelayaran kapal. Pencemaran lingkungan wilayah muara sungai, pesisir dan laut diabaikan aktivitas industri, dan aktivitas manusia lainnya yang tidak ramah lingkungan. Pencemaran ini mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang, padang lumut dan *mangrove* serta *estuaria*.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yang mencakup perundang-undangan, ketersediaan data base sumber daya kelautan, penguasaan Iptek kelautan belum dilaksanakan. Kerjasama antar daerah juga belum dilaksanakan dengan baik.

#### **b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek**

Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek untuk membantu optimalisasi sumber daya kelautan diarahkan untuk melakukan perencanaan dan implementasi pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor dan antar wilayah administrasi, menyusun metoda untuk mencegah dan merehabilitasi kerusakan ekosistem dikawasan pesisir dan laut, termasuk dampak pembangunan fisik yang berpotensi merusak lingkungan.

### **c. Program Litbangrap Iptek**

Untuk merealisasi kebijakan tersebut, Program Litbangrap Iptek yang diperlukan adalah:

1. Pemetaan wilayah dengan potensi dan kerusakan kawasan pesisir dan laut, serta upaya menemukan metode yang paling efektif untuk perbaikannya;
2. Pengembangan model pengelolaan kawasan pesisir untuk mengantisipasi pencemaran oleh industri dan sarana transportasi perairan;
3. Pengembangan model perikanan dan industri serta meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;

## BAB VI

### PRIORITAS UTAMA LITBANGRAP IPTEK

Dalam bab sebelumnya telah dikaji berbagai aspek pembangunan, Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek dan Program Litbangrap Iptek yang diperlukan selama 5 tahun 2006-2011. Kesemuanya adalah prioritas pembangunan berdasarkan kajian yang ada, kesemuanya layak dilaksanakan. Namun karena keterbatasan ketersediaan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan Program Litbangrap Iptek, keterbatasan pakar Iptek dalam berbagai bidang pembangunan, serta pentahapan pembangunan selama 5 tahun kedepan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka diperlukan PRIORITAS UTAMA Litbangrap Iptek ( PRIMA Litbangrap Iptek) di Kabupaten Pati.

Mempertimbangkan kebutuhan PRIMA Litbangrap Iptek dibandingkan dengan kebutuhan Litbangrap Iptek dalam bidang dan aset lain yang masih diperlukan, apalagi bila dikaitkan dengan kebutuhan sesaat dan kejadian luar biasa, maka ditetapkan sumber daya Litbangrap Iptek sebagai berikut:

- 60-70 % sumber daya untuk Litbangrap Iptek;
- 30-40 % sumber daya untuk Litbangrap Iptek lain.

Dari kajian sementara, maka ditetapkan 2 (dua) bidang yang menjadi Prioritas Utama Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati 2006-2011 yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian (dalam arti luas);
2. Bidang Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah (UKM/IKM).

Prioritas Utama Litbangrap Iptek didasarkan pada berbagai alasan, sebagaimana sering kali dikemukakan oleh Bupati Pati pada berbagai kesempatan, dan telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembangunan. Alasan yang kuat tersebut antara lain:

1. Sebagian besar rakyat Kabupaten Pati bekerja dan menopangkan hidupnya dengan bidang tersebut;
2. Bidang tersebut memiliki daya ungkit peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung;
3. Telah dikuasai berbagai prosedur, teknik, metoda dan manajemen untuk peningkatan usaha dibidang pembangunan tersebut.

## **A. Pertanian**

Pertanian diartikan sebagai semua jenis upaya memanfaatkan sumber daya alam secara biologis, melalui kegiatan-kegiatan pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Mencermati kajian tentang pembangunan dibidang pertanian dan kebijakan serta program Litbangrap Iptek yang diperlukan, ditetapkan 3 (tiga) kelompok Litbangrap Iptek bidang pertanian yang menjadi prioritas utama adalah:

### **1. Model Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Berbagai Bentuk:**

- a. Model pendidikan vokasional petani, untuk peningkatan kemampuan teknis pertanian bagi petani dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
- b. Model pengembangan kelompok tani (kearah pembentukan koperasi tani) untuk peningkatan kekuatan tawar petani terhadap berbagai kelompok terkait lain: pedagang, konsumen, dll;
- c. Model pengembangan bantuan pembiayaan bagi petani melalui kredit dan berbagai upaya permodalan lain ditingkat masyarakat tani

### **2. Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian**

- a. Peningkatan produksi dan mutu produk pertanian;

- b. Peningkatan efisiensi pengelolaan usahatani dan hasil usahatani;
- c. Pengembangan system pertanian organic;
- d. Diversifikasi produk pangan.

### **3. Pengembangan Model Tata Niaga Hasil Pertanian di Beberapa Aras Perdagangan dalam Beberapa Aspek:**

- a. Model peraturan tataniaga hasil pertanian yang memihak petani;
- b. Model penyediaan permodalan bagi pelaku tataniaga hasil pertanian;
- c. Transportasi lintas Kecamatan dan Kabupaten.

## **B. Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah (UKM/IKM)**

Usaha Kecil Menengah (UKM) dimaksudkan sebagai usaha yang ditopang permodalan maksimal 1 milyar rupiah. Aspek yang diprioritaskan dalam bidang ini adalah teknologi untuk Usaha Kecil Menengah tersebut, sehingga Prioritas Utama Litbangrap Iptek akan diberikan kepada Usaha Kecil Menengah yang mengarah atau sudah berada dalam lingkup industri. Dalam pengertian upaya yang menghasilkan barang yang layak dijual dipasar. Dalam prioritas ini tidak termasuk upaya penyediaan jasa, yang kecil-menengah.

Mencermati kajian tentang Usaha Kecil Menengah diatas, kebijakan dan program Litbangrap Iptek dalam bidang Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah ditetapkan menjadi 2 (dua) kelompok Litbangrap Iptek yaitu sebagai berikut:

### **1. Model Pemberdayaan Pelaku Industri Kecil Menengah dalam Berbagai Bentuk:**

- a. Model pendidikan vokasional pelaku Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah, untuk meningkatkan kemampuan teknis usaha/industri, untuk meningkatkan jumlah, mutu dan daya saing produk usaha/industri tersebut;
- b. Model pengembangan kelompok Usahawan Kecil Menengah/Industriawan Kecil Menengah (ke arah pembentukan koperasi) untuk meningkatkan kekuatan tawar

Usahawan/industriawan terhadap berbagai kelompok terkait, distributor, pedagang dan konsumen;

- c. Model pengembangan bantuan pembiayaan bagi Usahawan Kecil Menengah/Industriawan Kecil Menengah melalui kredit dan berbagai upaya permodalan lain ditingkat masyarakat;
- d. Model pengembangan bapak asuh, anak asuh antara indutri besar dengan Industri Kecil/Menengah;
- e. Model pendampingan untuk mendapatkan HKI.

2. **Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi** yang manusiawi (tepat guna) dan berwawasan lingkungan bagi Industri Kecil Menengah dengan berbagai spesifikasi industri, spesifikasi wilayah dan spesifikasi sasaran pemasaran, untuk meningkatkan produksi serta mutu dan daya saing produk industrinya dengan memperhatikan daya saing produk di masing-masing aras tersebut.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kabupaten Pati 2006-2011 merupakan acuan bagi segenap Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dalam bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek.

Kebijakan ini juga diharapkan dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas/Badan/Kantor perangkat Kabupaten Pati, Lembaga-lembaga Litbangrap Iptek, Dewan Riset Daerah (DRD), Perguruan Tinggi dan swasta, serta masyarakat pada umumnya yang berperan serta melaksanakan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati.

Manfaat kebijakan dalam keseluruhan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati, tergantung pada komitmen dan kesepakatan semua pihak terkait dan partisipasi semua pihak terkait, sebagai upaya terpadu dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Pati.

Khusus untuk Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati, berdasarkan diktum ini akan disusun Prioritas Utama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Prima Litbangrap Iptek), yang akan dipergunakan sebagai acuan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan petunjuk-Nya. Amien.

**BUPATI PATI**

**TASIMAN**

## MATRIK JASKTRA LITBANGRAP IPTEK KAB. PATI 2006-2011

No	Kondisi dan permasalahan	Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek	Program Litbangrap Iptek
A 1	<p>Ekonomi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi pertanian relatif stagnan</li> <li>- Sedikit penelitian dibidang off farm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberdayakan petani</li> <li>- Agribisnis dan agroindustri</li> <li>- Model tataniaga</li> <li>- Berbasis sumber daya lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model pemberdayaan petani</li> <li>- Pengembangan potensi unggulan lokal</li> <li>- Penerapan bibit/benih unggul</li> <li>- Informasi produksi pertanian</li> <li>- Pertanian organik</li> <li>- Tataniaga.</li> </ul>
2	<p>Perindustrian dan perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku unggulan masih rendah</li> <li>- Teknologi kurang</li> <li>- Inforamasi masih lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penggunaan bahan unggulan lokal</li> <li>- Penguasaan teknologi tepat guna</li> <li>- Tataniaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan potensi unggulan lokal</li> <li>- Pengembangan model pemberdayaan pelaku</li> <li>- Model tataniaga</li> </ul>
3	<p>Perkoperasian, Usaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi produksi masih rendah</li> <li>- Kualitas produk rendah</li> <li>- Lemahnya daya saing UKM dan Koperasi</li> <li>- Akses informasi</li> <li>- Permodalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran koperasi, UKM</li> <li>- Kembangan</li> <li>- Permodalan</li> <li>- Teknologi dan kemitraan KUMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model pemberdayaan koperasi, UKM</li> <li>- Pengembangan model kemitraan koperasi dan UKM</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Penguatan modal IKM/UKM</li> <li>- Penelitian dan pengembangan sentra IKM/UKM</li> </ul>
B 1	<p>Sosial Budaya dan Pemerintahan Hukum, HAM dan Kamtibmas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kesadaran, kepatuhan hukum dan pengembangan budaya hukum</li> <li>- Rendahnya sarana dan prasarana hukum</li> <li>- Kecenderungan menurunnya semangat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penegakan hukum</li> <li>- Kesadaran dan budaya hukum</li> <li>- Produk hukum daerah</li> <li>- Optimalisasi rasa aman masyarakat</li> <li>-Kesadaran rasa nasionalisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian faktor penegakan hukum, penerapan hukum dan Kamtibmas</li> <li>- Pengembangan model budaya hukum</li> <li>- Pengembangan model kamtibmas</li> <li>- Kajian evaluasi Linmas</li> </ul>

2	<p><b>Politik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecenderungan menurunnya partisipasi politik perempuan</li> <li>- Peran lembaga legislatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesadaran politik masyarakat</li> <li>- Efektivitas politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian budaya politik lokal</li> <li>- Model pendidikan elit Parpol</li> <li>- Model pendidikan politik rakyat</li> <li>- Kajian efektivitas pranata politik daerah</li> <li>- Kajian Pilkada</li> </ul>
3	<p><b>Kependudukan dan Ketenagakerjaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah</li> <li>- Gejala ketenagakerjaan masih terjadi</li> <li>- Kesejahteraan tenagakerja masih rendah</li> <li>- TKI ilegal masih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kependudukan diarahkan keluarga sejahtera sejak usia remaja</li> <li>- Pemberdayaan keluarga miskin</li> <li>- Peningkatan mutu tenaga kerja</li> <li>- Perlindungan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model pendidikan kesehatan reproduksi remaja</li> <li>- Model pengelolaan informasi kependudukan</li> <li>- Model pemberdayaan keluarga miskin</li> <li>- Pemetaan tenaga kerja</li> <li>- Manajemen terpadu tenaga kerja.</li> </ul>
4	<p><b>Pendidikan, Kebudayaan, Generasi Muda dan Olahraga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecenderungan biaya sekolah tinggi</li> <li>- Pendidikan non formal belum optimal</li> <li>- Perbedaan perlakuan sekolah negeri dengan sekolah swasta, pendidikan sekolah dengan madrasah</li> <li>- Kurangnya apresiasi bahasa, sastra dan kesenian daerah</li> <li>- Kenakalan kaum muda</li> <li>- Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan pemuda dan kelembagaan yang mantap</li> <li>- Peningkatan apresiasi bahasa, sastra dan kesenian daerah</li> <li>- Pembinaan olahragawan</li> <li>- Memasyarakatkan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model pendidikan budipekerti disekolah</li> <li>- Model pendidikan masyarakat miskin</li> <li>- Model partisipasi masyarakat dalam pendidikan</li> <li>- Model pendidikan diluar sekolah</li> <li>- Penetaan cagar budaya</li> <li>- Pembinaan pemuda produktif</li> <li>- Kajian evaluasi pembibitan dan pembinaan olahragawan</li> </ul>
5	<p><b>Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit infeksi, demam berdarah, malaria, HIV/AIDS, kusta, tuberkolose masih mengancam</li> <li>- Perundang-undangan bidang farmasi masih sangat lemah</li> <li>- Kesehatan lingkungan masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesehatan lingkungan</li> <li>- Penanganan penyakit menular dan KLB</li> <li>- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>- Pengembangan perilaku hidup sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan wilayah rawan penyakit menular dan KLB</li> <li>- Model penanggulangan penyakit menular dan KLB</li> <li>- Pengembangan dan pemerataan pelayanan kesehatan</li> <li>- Peningkatan perilaku hidup sehat</li> </ul>
6	<p><b>Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin meningkatnya penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</li> <li>- Peran masyarakat masih rendah dalam penanganan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</li> <li>- Banyak kasus kekerasan kepada perempuan</li> <li>- Kecenderungan pekerja anak, anak terlantar dan eksploitasi anak meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan komprehensif penanganan PMKS</li> <li>- Pemberdayaan perempuan</li> <li>- Peningkatan akses informasi dan pengutamaan gender</li> <li>- Penguatan kelembagaan anak dan remaja</li> <li>- Perlindungan pekerja anak dan remaja</li> <li>- Pengembangan partisipasi masyarakat, swasta dalam penanggulangan masalah sosial,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan PMKS termasuk anak dan remaja</li> <li>- Pengembangan partisipasi masyarakat terhadap masalah sosial, pemberdayaan perempuan, anak dan remaja</li> <li>- Mencegemen panti asuhan</li> <li>- Perlindungan hukum tenaga kerja perempuan, anak dan remaja</li> </ul>

7	<p><b>Agama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum menyentuh pada esensi keimanan dan ketakwaan</li> <li>- Belum menjadi kerangka landasan praktik kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan masyarakat</li> <li>- Lembaga-lembaga pendidikan agama belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin mantapnya fungsi dan peran agama dan lembaga agama</li> <li>- Semakin mantapnya peran lembaga pendidikan agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model partisipasi lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Kajian optimalisasi peran dan fungsi lembaga keagamaan</li> <li>- Evaluasi terhadap pendidikan agama disekolah</li> </ul>
8	<p><b>Aparatur Pemerintah Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporsi pendidikan dan profesional PNS masih agak timpang dan cenderung rendah dan tidak profesional</li> <li>- Masih adanya tumpang tindih Tupoksi</li> <li>- Manajemen pemerintahan belum efektif</li> <li>- Masih lemah pengawasan aparatur yang bersih dan berwibawa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah</li> <li>- Peningkatan manajemen pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur</li> <li>- Model peningkatan mutu profesionalisme aparatur</li> <li>- Evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan aparatur</li> <li>- Model kompetensi, assesment center dan pelayanan informasi melalui internet</li> </ul>
9	<p><b>Pemberdayaan Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendah akses dan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat</li> <li>- Belum optimalnya pembagian wewenang dan sumber daya dari pemerintah</li> <li>- Masih lemahnya jaringan informasi dan komunikasi masyarakat</li> <li>- Kurang mantapnya program pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi kapasitas lembaga masyarakat dan fungsi lembaga ekonomi masyarakat</li> <li>- Akses informasi dan komunikasi</li> <li>- Program pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model partisipasi masyarakat</li> <li>- Model pendidikan untuk masyarakat</li> <li>- Model kemitraan kelompok ekonomi</li> <li>- Evaluasi kinerja lembaga-lembaga ekonomi masyarakat</li> </ul>
10	<p><b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum efektif</li> <li>- Munculnya egoisme wilayah</li> <li>- Belum efektifnya kerjasama antar daerah</li> <li>- Masih tumpang tindih beberapa kewenangan</li> <li>- Masih banyak anggaran sektoral ditahan di pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kemandirian daerah berkesinambungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kinerja pelaksanaan Otonomi daerah</li> <li>- Evaluasi kerjasama antara daerah</li> </ul>
11	<p><b>Ilmu Pengahuan dan eknologi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran Lembaga Litbangrap Iptek belum optimal</li> <li>- Peran swasta belum digali</li> <li>- Mutu hasil penelitian belum tinggi, regulasi dan legeslasi belum menajakkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan peran dan mutu Litangrap Iptek</li> <li>- Pelihatan sector swasta</li> <li>- Peningkata mutu penelitian</li> <li>- Peningkatan regulasi dan legeslasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian kinerja Litbangrap Iptek</li> <li>- Peningkatan peran swasta, regulasi dan legeslasi</li> <li>- Pelatihan metodologi penelitian dan manajemen penelitian serta penulisan artikel ilmiah</li> </ul>

<p><b>C</b></p> <p><b>1</b></p>	<p><b>Fisik dan Prasarana Wilayah Sumberdaya Air dan Irigasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya kondisi, kapasitas dan kualitas aliran sungai</li> <li>- Erosi dari hulu</li> <li>- Pemanfaatan sumber air di kawasan DAS belum sesuai</li> <li>- Pengambilan air bawah tanah masih lemah pengawasannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan daerah resapan secara terpadu</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan kualitas air</li> <li>- Pengendalian banjir</li> <li>- Pengelolaan irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model penanganan DAS secara terpadu</li> <li>- Model pola tanam yang efisien</li> <li>- Model peningkatan kapasitas sungai dan kualitas air</li> <li>- Pemeliharaan waduk, bendung dan jaringan irigasi</li> </ul>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Sumberdaya Alam dan Lingkungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memanfaatkan potensi secara maksimal</li> <li>- Pencemaran udara meningkat</li> <li>- Perencanaan terpadu dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>- Perangkat hukum masih kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatasi kerusakan ekosistem</li> <li>- Mengantisipasi bencana alam</li> <li>- Bentuk optimalisasi lingkungan</li> <li>- Regulasi</li> <li>- SDM dan kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan potensi, pengembangan, pemanfaatan SDA</li> <li>- Pemetaan kerusakan ekosistem wilayah dan penanggulannya</li> <li>- Pemetaan lokasi potensial pencemaran udara</li> <li>- Model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat</li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Sumber Daya Kelautan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran muara sungai, pesisir</li> <li>- Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove</li> <li>- Data base sumber daya laut dan perangkat hukum belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu</li> <li>- Mecegah kerusakan ekosistem pesisir dan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan wilayah potensi dan kerusakan kawasan pesisir dan laut</li> <li>- Model pengelolaan kawasan pesisir</li> <li>- Model perikanan dan industri</li> </ul>

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kabupaten Pati 2006-2011 merupakan acuan bagi segenap Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dalam bidang penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek.

Kebijakan ini juga diharapkan dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas/Badan/Kantor perangkat Kabupaten Pati, Lembaga-lembaga Litbangrap Iptek, Dewan Riset Daerah (DRD), Perguruan Tinggi dan swasta, serta masyarakat pada umumnya yang berperan serta melaksanakan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati.

Manfaat kebijakan dalam keseluruhan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati, tergantung pada komitmen dan kesepakatan semua pihak terkait dan partisipasi semua pihak terkait, sebagai upaya terpadu dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Pati.

Khusus untuk Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati, berdasarkan diktum ini akan disusun Prioritas Utama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Prima Litbangrap Iptek), yang akan dipergunakan sebagai acuan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan petunjuk-Nya. Amien

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN EKSDA	
KELOMPOK KERJA	
SASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	

BUPATI PATI



TASIMAN

ASISTEN EKSDA Litbangrap Iptek, Pati 2005 49